

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Perusahaan Yang Tergabung Dalam Jakarta Islamic Index

*Jakarta Islamic Index* (JII) merupakan indeks terakhir yang dikembangkan oleh BEJ yang bekerja sama dengan *Danareksa Investment Management*. Adapun indeks sebelum *Jakarta Islamic Index* adalah Indeks Individual, Indeks Harga Sektoral, Indeks LQ 45, dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Indeks syariah merupakan indeks berdasarkan syariah islam. Saham-saham yang masuk dalam indeks syariah adalah emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah, seperti :

1. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
2. Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
3. Usaha yang memproduksi, mendistribusikan serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram.
4. Usaha yang memproduksi, mendistribusi atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat *mudharat*.

Adapun tahapan atau seleksi untuk saham yang masuk dalam indeks syariah antara lain :

- a. Memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan (kecuali termasuk dalam 10 besar dalam hal kapitalisasi).
- b. Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tenaga tahun terakhir yang memiliki rasio kewajiban terhadap aktiva maksimal sebesar 90%.
- c. Memilih 60 saham dari susunan saham di atas berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar tersebar selama satu tahun terakhir.

- d. Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan reguler selama satu tahun terakhir.

Pengkajian ulang akan dilakukan 6 bulan sekali dengan penentuan komponen indeks awal bulan Januari dan Juli setiap tahunnya. Sedangkan perubahan pada jenis usaha emiten akan dimonitor secara terus menerus berdasarkan data publik dan media. Indeks harga saham setiap hari dihitung menggunakan harga saham terakhir yang terjadi di bursa.<sup>1</sup>

Adapun saham-saham yang masuk dalam indeks syariah adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Perusahaan Yang Tergabung Dalam Jakarta Islamic Index<sup>2</sup>**

No	Kode	Nama Perusahaan
1	AALI	PT Astra Agro Lestari Tbk
2	ADRO	PT Adaro Energy Tbk
3	AKRA	PT AKR Corporindo Tbk
4	ASII	PT Astra International Tbk
5	ASRI	PT Alam Sutera Realty Tbk
6	BMTR	PT Global Mediacom Tbk
7	BSDE	PT Bumi Serpong Damai Tbk
8	CPIN	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
9	EXCL	PT Excelcomindo Pratama Tbk
10	HRUM	PT Harum Energy Tbk
11	ICBP	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
12	INDF	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
13	INTP	PT Indocement Tunggul Prakasa Tbk
14	ITMG	PT Indo Tambangraya Megah Tbk
15	JSMR	PT Jasa Marga (Persero) Tbk
16	KLBF	PT Kalbe Farma Tbk
17	LPKR	PT Lippo Karawaci Tbk
18	LSIP	PT Perusahaan Perkebunan London Sumatera Indonesia Tbk
19	MAPI	PT Mitra Adiperkasa Tbk
20	MNCN	PT Media Nusantara Citra Tbk
21	MPPA	PT Matahari Putra Prima Tbk
22	PGAS	PT Perusahaan Gas Negara Tbk
23	PTBA	PT Bukit Asam (Persero) Tbk
24	PWON	PT Pakuwon Jati Tbk
25	SMGR	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

<sup>1</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi Edisi 4*, Ekonisia, Yogyakarta, 2013, hlm. 209.

<sup>2</sup><http://agenprusyariah.com/jakarta-islamic-index/>, di akses pada tanggal 20 Januari 2016 jam 22:07 WIB

No	Kode	Nama Perusahaan
26	SMRA	PT Summarecon Agung Tbk
27	TLKM	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
28	UNTR	PT United Tractors Tbk
29	UNVR	PT Unilever Indonesia Tbk
30	WIKA	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Sumber :<http://agenprusyariah.com/jakarta-islamic-index/> ,di akses pada tanggal 20 Januari 2016 jam 22:07 WIB

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) dari tahun 2011-2014 yang terdiri dari 30 perusahaan. Untuk mengukur integritas laporan keuangan diperlukan adanya biaya riset dan pengembangan, menggunakan amortisasi saldo menurun, metode persediaan rata-rata. Namun hanya beberapa perusahaan saja yang menyantumkan biaya riset dan pengembangan tersebut.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan metode *purposivesampling* dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Terdaftar di perusahaan *Jakarta Islamic Index* (JII).
- 2) Perusahaan yang mempublikasikan *annual report* untuk periode 31 Desember 2011-2014 secara berturut turut.
- 3) Telah membentuk komite audit, komisaris independen sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 4) Nama kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan perusahaan tertera dengan jelas pada laporan keuangan yang dipublikasikan.

Berikut tabel pemilihan sampel dalam penelitian ini :

**Tabel 4.2**  
**Daftar Pemilihan Sampel**

No	Keterangan	Jumlah Perusahaan
1	Terdaftar di perusahaan Jakarta Islamic Index (JII).	30
2	Perusahaan yang mempublikasikan <i>annual report</i> untuk periode 31 desember 2011 sampai tahun 2014 secara berturut turut.	30
3	Perusahaan yang menjadi sampel	30
	Tahun Pengamatan	4
	Jumlah sampel perusahaan selama tahun penelitian	120

## B. Deskripsi Variabel Penelitian

Sebagaimana telah dinyatakan di sub bab terdahulu, bahwa penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Terdapat tujuh variabel penelitian, yaitu satu variabel dependen, yang dalam hal ini adalah integritas laporan keuangan, serta enam variabel independen yaitu Komisaris Independen ( $X_1$ ), Kepemilikan Manajerial ( $X_2$ ), Kepemilikan Institusional ( $X_3$ ), Komite Audit ( $X_4$ ), Audit Tenure ( $X_5$ ), Spesifikasi kantortan Audit ( $X_6$ ).

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi mekanisme *corporate governance* yang terdiri dari (komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, audit *tenure* dan spesifikasi kantortan audit) sedangkan variabel dependen yaitu integritas laporan keuangan. Untuk memberikan gambaran tentang variabel penelitian, akan dijelaskan dalam deskripsi variabel penelitian sebagai berikut:

### 1. Deskripsi Variabel Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan sebuah badan dalam perusahaan yang biasanya beranggotakan dewan komisaris yang independen yang berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan. Komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam

rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait.<sup>3</sup>

Menurut Fama dan Jensen, komisaris independen menjadi penengah apabila terjadi perselisihan baik diantara internal manajer maupun manajer dengan pemegang saham atau biasa disebut engan konflik keagengan serta mengawasi kebijakan-kebijakan dan memberikan nasihat kepada manajer. Komisaris independen merupakan solusi terbaik agar dalam mengurangi resiko manipulasi yang dilakukan oleh manajemen terhadap keintegritasan laporan keuangan. Pengawasan yang dilakukan oleh anggota komisaris independen akan lebih baik dan bebas dari berbagai kepentingan intern pihak perusahaan.<sup>4</sup>

Dewan Komisaris mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan, pemantauan, serta memberikan panduan dan nasihat kepada Direksi dalam pengelolaan perusahaan. Peranan pengawasan ini bertujuan untuk memastikan agar Direksi mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya. Dewan Komisaris menjalankan tanggung jawabnya secara efektif melalui pemberian sejumlah arahan dan keputusan yang telah dicapai dalam rapat-rapat di sepanjang tahun. Adapun susunan dan struktur dewan komisaris adalah sebagai berikut :

**a. Susunan dan Struktur**

Dewan Komisaris dalam setiap perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index terdiri dari Presiden Komisaris dan Komisaris Independen. Susunan ini sesuai dengan Surat Edaran Ketua Bapepam-LK No. SE-03/PM/2000 dan Peraturan IDX No. I-A, yang menetapkan jumlah Komisaris Independen di perusahaan terbuka sekurang-kurangnya 30 persen dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. Komisaris Independen mempunyai peranan penting di Perseroan karena mereka mewakili kepentingan masyarakat umum

---

<sup>3</sup> *Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makasar 26-28 Juli 2007*, hlm. 9.

<sup>4</sup> Ocktavia Nicolin dan Arifin Sabeni, *Pengaruh Struktur Corporate Governance, Audit Tenure, dan Spesialisasi Industri Auditor Terhadap Integritas Laporan Keuangan*, Jurnal Akuntansi Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013, hlm. 2.

dengan memonitor manajemen Perseroan. Penting dicatat bahwa satu dari Komisaris Independen perusahaan merupakan Ketua Komite Audit Perseroan.

**b. Independensi**

Jumlah anggota Komisaris Independen dalam Dewan Komisaris perusahaan telah memenuhi ketentuan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.Kep-305/BEJ/07-2004 perihal Peraturan No.I-A tentang Pencatatan Efek dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Publik, yang menyatakan bahwa sedikitnya 30 persen dari anggota Dewan Komisaris perusahaan publik harus merupakan Komisaris Independen. Setiap perusahaan mempunyai Komisaris Independen, yang telah mewakili hampir 50 persen dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris. Tidak satu pun anggota Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai hubungan darah satu sama lain sampai derajat ketiga, baik secara vertikal maupun horizontal, atau karena pernikahan.

**c. Tugas dan Tanggung Jawab**

Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang mempunyai tugas pengawasan umum dan khusus atas manajemen perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index sesuai dengan batasan-batasan yang ditentukan di dalam AD. Anggota Dewan Komisaris wajib, dengan itikad baik dan tanggung jawab penuh, melakukan tugas demi kepentingan Perseroan. Sehubungan dengan ini, Dewan Komisaris dapat memberikan nasihat kepada Direksi agar manajemen perusahaan mengelola Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha setiap perusahaan. Dewan Komisaris dibentuk sebagai satu Badan (Dewan), oleh karena itu setiap anggota Dewan Komisaris tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan harus berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

**d. Persyaratan dan Masa Kerja**

Pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris perusahaan publik mewajibkan kandidat tersebut untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Ketentuan dasar bagi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam kapasitas cakap melakukan tindakan hukum, yaitu tidak dalam pengampuan.
- 2) Tidak pernah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.
- 3) Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit.
- 4) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara atau sektor keuangan dalam jangka waktu lima tahun terakhir sebelum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris perusahaan.
- 5) Mempunyai akhlak dan moral yang baik.
- 6) Mampu melakukan perbuatan hukum.
- 7) Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari pekerjaan atau jabatan selama lima tahun terakhir sebelum pengangkatan. Dan tidak pernah dipenjara karena tindak pidana apapun selama sepuluh tahun terakhir sebelum pengangkatan.

Sedangkan Persyaratan khusus untuk Komisaris Independen adalah sebagai berikut :

- a) Berasal dari luar perusahaan, tidak memiliki saham, baik langsung maupun tidak langsung dalam perusahaan publik.
- b) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan publik, Dewan Komisaris, Direksi, atau pemegang saham mayoritas perusahaan publik.
- c) Tidak mempunyai hubungan usaha, langsung atau tidak langsung, berkaitan dengan bisnis utama dari perusahaan publik.

- d) Tidak sedang memegang jabatan sebagai direktur di salah satu perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan publik; dan
- e) Memahami peraturan pasar modal Setelah pengangkatan, perusahaan mewajibkan setiap anggota Dewan Komisaris untuk menandatangani surat pernyataan yang menyatakan penerimaan atas kewajiban yang dimaksud. Sesuai dengan perusahaan, Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya tiga anggota termasuk Presiden Komisaris. Anggota Dewan Komisaris dipilih dalam RUPS untuk masa jabatan tiga tahun, dan bisa diangkat lagi padasaat berakhirnya masa jabatannya atau diakhiri sebelum habis masa jabatannya. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya. Namun demikian, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak dibebaskan dari tanggung jawabnya sampai pengunduran atas dirinya diterima oleh RUPS. Jabatan anggota Komisaris dapat berakhir sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, yang antara lain apabila anggota Dewan Komisaris tersebut meninggal dunia dan keadaan yang menyebabkan anggota Dewan Komisaris tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan yang berlaku.

**e. Prosedur Pencalonan dan Pengangkatan**

Perusahaan menerapkan prosedur pencalonan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris di bawah ini:

- 1) Setiap kandidat anggota Dewan Komisaris yang diusulkan oleh Pemegang Saham dan/atau Perseroan akan diajukan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi (NRC) melalui Sekretaris Perusahaan.
- 2) Selanjutnya NRC akan memeriksa dan membahasnya dalam rapat RNC atau dengan keputusan secara sirkuler untuk menentukan apakah kualifikasi dan latar belakang calon anggota Dewan

Komisaris tersebut telah memenuhi persyaratan, layak untuk diangkat oleh RUPS sebagai anggota Dewan Komisaris.

- 3) RUPS harus diselenggarakan oleh perusahaan untuk memutuskan pengangkatan kandidat yang direkomendasikan oleh NRC.

**f. Rapat Dewan Komisaris**

Rapat Dewan Komisaris diadakan setiap tiga bulan dan kapan saja dianggap perlu atas permintaan dari satu atau lebih anggota Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat tersebut dapat diadakan di kantor Perseroan atau tempat lain yang disetujui oleh Dewan Komisaris. Selain itu, rapat Dewan Komisaris juga dapat diadakan melalui sarana teknologi yang tersedia seperti konferensi telepon dan video. Partisipasi dalam konferensi ini dianggap kehadiran secara langsung dalam rapat Dewan Komisaris. Selain itu, keputusan yang sah juga dapat diambil oleh Dewan Komisaris melalui cara sirkuler, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis atau melalui surat elektronik (email) dan semua anggota Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan, yang dibuktikan dengan adanya tandatangan ataupun email persetujuan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dalam rapat yang sah. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris. Apabila Presiden Komisaris berhalangan hadir, maka rapat dapat dipimpin oleh seorang Komisaris yang ditunjuk oleh semua Komisaris yang hadir. Komisaris yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Komisaris lain melalui surat kuasa. Seorang Komisaris hanya dapat mewakili satu Komisaris lain di rapat Dewan Komisaris.<sup>5</sup>

Dari uraian penjelasan diatas, setiap perusahaan yang tergabung dalam jakarta islamic index pasti memiliki komisaris

---

<sup>5</sup> *Annual report perusahaan* PT Excelcomindo Pratama Tbk ( XL , hlm. 102-106.

independen. Untuk melihat apakah semua perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index periode 2011 sampai dengan 2014 memiliki komisaris independen atau tidak, berikut kumpulan data komisaris independen pada perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index :

**Tabel 4.3**  
**Komisaris Independen Tahun 2011 dan 2012**

No	Kode Perusahaan	Komisaris Independen 2011		Komisaris Independen 2012	
		Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
1	AALI	5	0,05	5	0,05
2	ADRO	2	0,02	2	0,02
3	AKRA	1	0,01	1	0,01
4	ASII	5	0,05	3	0,03
5	ASRI	2	0,02	2	0,02
6	BMTR	2	0,02	2	0,02
7	BSDE	3	0,03	3	0,03
8	CPIN	2	0,02	2	0,02
9	EXCL	4	0,04	4	0,04
10	HRUM	2	0,02	2	0,02
11	ICBP	3	0,03	3	0,03
12	INDF	3	0,03	3	0,03
13	INTP	3	0,03	3	0,03
14	ITMG	1	0,01	1	0,01
15	JSMR	2	0,02	2	0,02
16	KLBF	2	0,02	2	0,02
17	LPKR	4	0,04	5	0,05
18	LSIP	3	0,03	4	0,04
19	MAPI	2	0,02	2	0,02
20	MNCN	2	0,02	2	0,02
21	MPPA	2	0,02	2	0,02
22	PGAS	2	0,02	2	0,02
23	PTBA	2	0,02	2	0,02
24	PWON	2	0,02	2	0,02
25	SMGR	0	0,00	3	0,03
26	SMRA	2	0,02	2	0,02
27	TLKM	2	0,02	2	0,02
28	UNTR	3	0,03	3	0,03
29	UNVR	4	0,04	4	0,04
30	WIKA	2	0,02	2	0,02

*Sumber : Annual report perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index periode 2011 dan 2012 yang diolah.*

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwasanya untuk tahun 2011 dan tahun 2012 dalam perusahaan Jakarta Islamic Index memiliki komisaris independen. Hal ini tidak sesuai dengan Surat

Edaran Ketua Bapepam-LK No.SE-03/PM/2000 dan Peraturan IDX No.I-A, yang menetapkan jumlah Komisaris Independen di perusahaan terbuka sekurang-kurangnya 30 persen dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. Karena tugas dan peranan penting di Perseroan bagi komisaris independen begitu penting untuk jalannya suatu perusahaan. Mereka mewakili kepentingan masyarakat umum dengan memonitor manajemen Perseroan. Dan penting dicatat bahwa satu dari Komisaris Independen perusahaan merupakan Ketua Komite Audit Perseroan.

**Tabel 4.4**  
**Komisaris Independen Tahun 2013 dan 2014**

No	Kode Perusahaan	Komisaris Independen 2013		Komisaris Independen 2014	
		Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
1	AALI	3	0,03	2	0,02
2	ADRO	3	0,03	2	0,02
3	AKRA	1	0,01	1	0,01
4	ASII	3	0,03	4	0,04
5	ASRI	2	0,02	2	0,02
6	BMTR	2	0,02	2	0,02
7	BSDE	3	0,03	3	0,03
8	CPIN	2	0,02	2	0,02
9	EXCL	2	0,02	0	0
10	HRUM	2	0,02	2	0,02
11	ICBP	3	0,03	3	0,03
12	INDF	3	0,03	3	0,03
13	INTP	3	0,03	3	0,03
14	ITMG	2	0,02	1	0,01
15	JSMR	2	0,02	2	0,02
16	KLBF	2	0,02	2	0,02
17	LPKR	6	0,06	6	0,06
18	LSIP	3	0,03	3	0,03
19	MAPI	2	0,02	2	0,02
20	MNCN	2	0,02	1	0,01
21	MPPA	2	0,02	2	0,02
22	PGAS	2	0,02	2	0,02
23	PTBA	3	0,03	2	0,02
24	PWON	2	0,02	4	0,04
25	SMGR	3	0,03	0	0
26	SMRA	2	0,02	2	0,02
27	TLKM	3	0,03	3	0,03
28	UNTR	3	0,03	0	0
29	UNVR	4	0,04	4	0,04
30	WIKA	2	0,02	2	0,02

*Sumber : Annual report perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic index periode 2013 dan 2014 yang diolah.*

Dan berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwasanya dari 30 perusahaan yang tergabung dalam *Jakarta Islamic Index* ada yang tidak memiliki komisaris independen. Hal ini juga tidak sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.Kep-305/BEJ/07-2004 perihal Peraturan No.I-A tentang Pencatatan Efek dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Publik, yang menyatakan bahwa sedikitnya 30 persen dari anggota Dewan Komisaris perusahaan publik harus merupakan Komisaris Independen. Setiap perusahaan mempunyai Komisaris Independen, yang telah mewakili hampir 50 persen dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris.

## 2. Deskripsi Variabel Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah proporsi pemegang saham oleh pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan, yaitu direksi dan komisaris (Pujiati dan Widanar,2009). Menurut Jensen dan Meckling (1976) kepemilikan saham oleh manajer dapat mensejajarkan kepentingan manajer dan pemegang saham karena dengan memiliki saham perusahaan, manajer akan merasakan langsung manfaat dari setiap keputusan yang diambilnya, begitu pula bila terjadi kesalahan maka manajer juga akan merasakan dan menanggung kerugian sebagai salah satu konsekuensi kepemilikan saham. Hal ini merupakan insentif bagi manajer untuk meningkatkan kinerja perusahaan.<sup>6</sup>Berikut daftar tabel kepemilikan manajerial dari masing-masing perusahaan yang tergabung dalam jakarta islamic index dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 :

---

<sup>6</sup> Maria Fransisca Widyati, *Pengaruh dewan Direksi, Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan*, Jurnal Ilmu Manajemen, Volume 1, Nomor 1 Januari, 2013, hlm. 238.

**Tabel 4.5**  
**Kepemilikan Manajerial**

No	Kode	Kepemilikan Manajerial			
		2011	2012	2013	2014
1	AALI	79,68	79,68	79,68	79,68
2	ADRO	59,83	59,83	59,06	59,03
3	AKRA	60,54	14,07	13,06	15
4	ASII	50,15	50,14	0,04	0,04
5	ASRI	49,52	52,62	51,08	51,48
6	BMTR	0	8,31	8,31	0,62
7	BSDE	0	63,12	63,12	64,88
8	CPIN	0	0	0	55,53
9	EXCL	79,09	66,55	66,48	0
10	HRUM	70,04	70,49	70,72	70,49
11	ICBP	80,58	80,53	80,53	80,53
12	INDF	50,13	50,09	50,09	50,09
13	INTP	51	0	0	0
14	ITMG	65,02	65,03	65,02	65,08
15	JSMR	0	0	0	0
16	KLBF	0	0	0	0
17	LPKR	17,96	18,12	18,12	23,44
18	LSIP	59,48	59,48	59,51	59,51
19	MAPI	56	0	56	56
20	MNCN	75,01	69	67,31	71,58
21	MPPA	0,16	0	98,15	76,31
22	PGAS	0	0	0	0
23	PTBA	0,04	0,03	0	0,03
24	PWON	80,52	70,39	52,21	57,64
25	SMGR	0	0	0	0
26	SMRA	0,3	0,28	0,28	0
27	TLKM	0	0	0	0
28	UNTR	0	0	0,06	0
29	UNVR	85	85	85	85
30	WIKA	79,69	34,85	34,85	0,15

Sumber : Annual report perusahaan JII tahun 2011-2014

Dari tabel 4.5, diketahui bahwasanya perusahaan yang kepemilikan manajerialnya 0 % ada 36 perusahaan. Untuk kepemilikan manajerial 0% - 50% ada 22 perusahaan. Dan yang 50 % sampai 100% ada 62 perusahaan. Ini membuktikan bahwasanya keberadaan

kepemilikan manajerial dalam perusahaan mempengaruhi akan suatu hasil keputusan atas resiko yang dihadapi perusahaan.

### 3. Deskripsi Variabel Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun dan investment banking (Siregar dan Utama, 2005). Institusi merupakan sebuah lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham sehingga biasanya institusi menyerahkan tanggungjawab kepada divisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan tersebut. Karena institusi memantau secara profesional perkembangan investasinya maka tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga potensi kecurangan dapat ditekan (Murwaningsari, 2009). Bathala menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh institusi merupakan salah satu monitoring agents penting yang memainkan peranan aktif dan konsisten dalam melindungi investasi saham yang ditanamkan dalam perusahaan. Mekanisme monitoring tersebut akan menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham.<sup>7</sup> Berikut daftar tabel kepemilikan manajerial dari masing-masing perusahaan yang tergabung dalam *Jakarta Islamic Index* dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 :

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm.239.

**Tabel 4.6**  
**Kepemilikan Institusional**

No	Kode	Kepemilikan Institusional			
		2011	2012	2013	2014
1	AALI	20,32	20,32	20,32	20,32
2	ADRO	40,17	40,17	40,94	40,97
3	AKRA	39,46	0	0	0
4	ASII	0	0	50,11	50,11
5	ASRI	50,48	47,38	48,2	48,52
6	BMTR	31,92	39,4	39,4	49,23
7	BSDE	26,27	36,88	36,88	35,12
8	CPIN	44,47	44,47	44,47	44,47
9	EXCL	20,1	33,45	33,52	0
10	HRUM	29,64	29,5	29,27	29,5
11	ICBP	0	0	0	0
12	INDF	0	0	0	0
13	INTP	13,01	64,03	64,03	64,03
14	ITMG	34,98	34,97	34,98	34,92
15	JSMR	0	34,74	34,74	8,21
16	KLBF	56,64	56,63	56,71	56,71
17	LPKR	82,04	81,88	81,88	76,56
18	LSIP	40,52	40,52	40,49	40,49
19	MAPI	44	0	44	44
20	MNCN	24,98	30	32,69	28,42
21	MPPA	0,05	0	1,85	23,68
22	PGAS	0	0	0	0
23	PTBA	96,94	99,41	32,07	94,34
24	PWON	15,25	29,61	47,79	42,36
25	SMGR	0	0	0	0
26	SMRA	99,07	99,72	99,72	0
27	TLKM	0	0	0	0
28	UNTR	0	0	99,94	0
29	UNVR	15	15	15	15
30	WIKA	20,31	65,51	65,15	0

Sumber : Annual report perusahaan JII tahun 2011-2014

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, diketahui bahwsanya perusahaan yang memiliki 0 % kepemilikan institusional ada 33 perusahaan. Untuk perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional sebesar 10% keatas sampai dengan 50% ada 63. Dan yang diatas 50% sampai 100%

ada 24 perusahaan saja. Ini membuktikan bahwasanya keberadaan kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan mempengaruhi tindakan yang dilakukan untuk memonitoring suatu perusahaan.

#### 4. Deskripsi Variabel Komite Audit

Komite Audit bertanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit mengevaluasi integritas laporan keuangan yang diterbitkan Perseroan, menelaah efektivitas sistem pengendalian internal, dan mengidentifikasi potensi permasalahan yang timbul karena pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, Komite Audit berpedoman pada Pedoman Kerja Komite Audit, yang mengatur tugas dan tanggung jawab Komite, dan semua peraturan Bapepam-LK dan Bursa Efek yang relevan.

Adapun tugas komite audit adalah sebagai berikut :

- a. Mengkaji kelayakan dan integritas manajemen risiko yang dihadapi oleh perusahaan yang tergabung dalam *Jakarta Islamic Index*, sistem pengendalian internal, dan sistem manajemen informasi, termasuk sistem untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, keputusan dan panduan yang berlaku.
- b. Mengusulkan struktur manajemen resiko dan pengendalian internal yang memadai kepada Manajemen untuk menjaga aset milik perusahaan *Jakarta Islamic Index* dan melaporkan risiko-risiko yang dihadapi perusahaan kepada Dewan Komisaris.
- c. Mengkaji profil risiko di perusahaan yang tergabung dalam *Jakarta Islamic Index* dan berbagai inisiatif utama yang berdampak signifikan pada bisnis perusahaan.
- d. Memeriksa Laporan keuangan triwulanan, tengah tahunan dan tahunan perusahaan jakarta islamix index, dengan memfokuskan pada setiap adanya perubahan kebijakan dan praktik akuntansi, penyesuaian signifikan atau material atas akun perusahaan, dampak

hasil audit, peristiwa tidak wajar yang signifikan atau luar biasa atau kegiatan yang tidak biasa, asumsi dan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang telah disetujui, ketentuan dan persyaratan bursa efek dan peraturan lainnya.

- e. Bersama Auditor Eksternal memeriksa Laporan keuangan yang akan disetujui sebelum laporan keuangan yang sudah diaudit tersebut diserahkan kepada Dewan Komisaris untuk disahkan.
- f. Membahas masalah dan keberatan terhadap hasil audit sementara dan final dan hal-hal lain yang mungkin dibicarakan oleh pihak auditor tanpa kehadiran pihak Manajemen, bila diperlukan;
- g. Mengusulkan praktik terbaik dalam hal keterbukaan laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam TataKelola Perusahaan, peraturan perundang-undangan, keputusan dan panduan yang berlaku,
- h. Memeriksa Tindak lanjut yang dilakukan oleh Manajemen atas kelemahan prosedur akuntansi internal dan pengendalian yang ditemukan oleh auditor eksternal dan internal sesuai laporan kepada manajemen.<sup>8</sup> Dan untuk mengetahui efektifitas kinerja komite audit, maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

---

<sup>8</sup> Annual report PT Excelcomindo Pratama Tbk Tahun 2011, hlm. 118-119.

**Tabel 4.7**  
**Efektifitas Kinerja Komite Audit 2011-2012**

No	Kode	Komite Audit 2011		Komite Audit 2012	
		Jumlah kehadiran rapat	Persen	Jumlah kehadiran rapat	Persen
1	AALI	0	0%	0	0%
2	ADRO	63	91,30%	0	0%
3	AKRA	12	100%	12	100%
4	ASII	9	90%	6	100%
5	ASRI	22	91,66%	22	92%
6	BMTR	8	66,67%	14	93,30%
7	BSDE	6	100%	23	85,18%
8	CPIN	165	89,18%	174	96,66%
9	EXCL	17	85%	21	87,50%
10	HRUM	7	58,30%	5	66,60%
11	ICBP	7	88%	7	100%
12	INDF	0	0%	0	0%
13	INTP	4	100%	4	100%
14	ITMG	32	88,80%	33	91,66%
15	JSMR	53	65,47%	10	100%
16	KLBF	8	88,80%	4	100%
17	LPKR	4	100%	6	100%
18	LSIP	0	0%	13	100%
19	MAPI	0	0%	0	0%
20	MNCN	8	50,00%	12	80%
21	MPPA	4	100%	0	0%
22	PGAS	0	0%	488	8,56%
23	PTBA	3	100%	143	99,30%
24	PWON	4	100%	4	100%
25	SMGR	0	0%	123	52,78%
26	SMRA	4	100%	4	100%
27	TLKM	153	85%	157	66,41%
28	UNTR	12	100%	3	100%
29	UNVR	4	100%	4	100%
30	WIKA	36	92,30%	5	100%

Sumber : Annul report perusahaan JII tahun 2011 dan 2012

Dari tabel 4.7 diatas, dapat diketahui bahwasanya dalam perusahaan *Jakarta Islamic Index* untuk periode 2011 dan 2012 diketahui bahwasanya untuk mengukur kinerja komite audit, maka dilihat berdasarkan dari kehadiran rapatnya. Di tabel 4.7 tertulis 0 %

itu artinya bukan komite tidak hadir dalam rapat. Namun, pada kenyatannya di dalam annual report pada perusahaan tertentu tidak dituliskan secara jelas mengenai kehadiran rapat komite. Tolok ukur efektivitas kerja yang baik diukur dengan jumlah persen kehadiran rapat komite yaitu 100%. Semakin tinggi persennya maka dikatakan komite audit bekerja dengan baik dan begitu pula sebaliknya. Semakin kecil tingkat persennya maka semakin tidak efektif dalam bekerja. Karena tugas komite audit sangatlah penting dalam pengambilan keputusan perusahaan yaitu memeriksa laporan keuangan triwulanan, tengah tahunan dan tahunan perusahaan *Jakarta Islamix Index*, dengan memfokuskan pada setiap adanya perubahan kebijakan dan praktik akuntansi, penyesuaian signifikan atau material atas akun perusahaan, dampak hasil audit, peristiwa tidak wajar yang signifikan atau luar biasa atau kegiatan yang tidak biasa, asumsi dan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang telah disetujui, ketentuan dan persyaratan bursa efek dan peraturan lainnya seperti pedoman tugas komite yang tercantum dalam peraturan Bapepam-LK dan Bursa Efek yang relevan. Dan untuk melihat keefektifan jumlah kehadiran rapat untuk tahun 2013 dan 2014 maka lihat tabel berikut :

**Tabel 4.8**  
**Efektifitas Kinerja Komite Audit 2013-2014**

No	Kode	Komite Audit 2013		Komite Audit 2014	
		Jumlah kehadiran rapat	Persen	Jumlah kehadiran rapat	Persen
1	AALI	0	0%	0	0%
2	ADRO	68	94,40%	69	95,80%
3	AKRA	47	97,91%	12	100%
4	ASII	5	100%	6	97%
5	ASRI	21	87,50%	4	100%
6	BMTR	4	100%	8	66,60%
7	BSDE	9	100%	5	100%
8	CPIN	66	94,28%	148	92,50%
9	EXCL	26	92,80%	0	0%
10	HRUM	14	93,30%	14	93,30%
11	ICBP	6	87%	7	85%
12	INDF	0	0%	0	0%
13	INTP	4	100%	4	100%
14	ITMG	7	87,50%	11	91,67%
15	JSMR	4	100%	173	82,38%
16	KLBF	11	91,66%	3	75%
17	LPKR	15	83,33%	9	45%
18	LSIP	6	100%	2	100%
19	MAPI	0	0%	0	0%
20	MNCN	10	83,30%	4	100%
21	MPPA	4	100%	0	0%
22	PGAS	266	77,77%	190	86,36%
23	PTBA	55	96,49%	395	98,75%
24	PWON	10	83,33%	5	0%
25	SMGR	0	0%	0	0%
26	SMRA	4	100%	4	100%
27	TLKM	145	80,55%	156	68,42%
28	UNTR	3	100%	0	0%
29	UNVR	3	100%	3	100%
30	WIKA	65	81,25%	5	100%

Sumber : *Annul report perusahaan JII tahun 2011 dan 2012*

Dari tabel 4.8 diatas, dapat diketahui bahwasanya dalam perusahaan *Jakarta Islamic Index* untuk periode 2013 dan 2014 diketahui bahwasanya untuk mengukur kinerja komite audit, maka

dilihat berdasarkan dari kehadiran rapatnya. Di tabel 4.8 ada yang tertulis 0 %. Artinya bukan komite tidak hadir dalam rapat. Namun, pada kenyatannya di dalam *annual report* pada perusahaan tertentu tidak dituliskan secara jelas mengenai kehadiran rapat komite, atau jumlah kehadiran rapat komite memang sengaja tidak dijelaskan dalam annual report untuk kepentingan yang lain bagi perusahaan tertentu. Tolok ukur efektivitas kerja yang baik bagi komite audit diukur dengan jumlah persen kehadiran rapat komite yaitu 100%. Semakin tinggi persennya maka dikatakan komite audit bekerja dengan baik dan begitu pula sebaliknya. Semakin kecil tingkat persennya maka semakin tidak efektif dalam bekerja.

#### 5. Deskripsi Variabel Audit Tenure

Pembatasan Masa Pemberian Jasa Bagi Akuntan Publik di Indonesia atau yang biasa disebut dengan *Auditor Tenure* adalah lamanya waktu auditor tersebut secara berturut-turut telah melakukan pekerjaan audit terhadap suatu perusahaan. Dalam terminologi Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 auditor *tenure* identik dengan masa pemberian jasa bagi akuntan publik. Menteri Keuangan RI pada tanggal 5 Pebruari 2008 menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik yang merupakan penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan No. 423/KMK.06/2002 dan No. 359/KMK.06/2003 yang dianggap sudah tidak memadai.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut terdapat pokok-pokok penyempurnaan peraturan mengenai pembatasan masa pemberian jasa bagi akuntan, laporan kegiatan, dan asosiasi profesi akuntan publik. Khususnya hal yang berhubungan dengan pembatasan masa pemberian jasa bagi akuntan publik, terdapat perubahan dimana sebelumnya Keputusan Menteri Keuangan No. 423/KMK.06/2002 dan No. 359/KMK.06 /2003 menyatakan KAP dapat memberikan jasa audit umum paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut

kemudian dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 diubah menjadi 6 (enam) tahun buku berturut-turut.

Berikut ini isi dari Pasal 3 dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tersebut :

- a. Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.
- b. Akuntan Publik sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat menerima kembali penugasan audit umum untuk klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut.
- c. Jasa audit umum atas laporan keuangan dapat diberikan kembali kepada klien yang sama melalui KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 1 (satu) tahun buku tidak diberikan melalui KAP tersebut.
- d. Dalam hal KAP yang telah menyelenggarakan audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas melakukan perubahan komposisi Akuntan Publiknya, maka terhadap KAP tersebut tetap diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- e. KAP yang melakukan perubahan komposisi Akuntan Publik yang mengakibatkan jumlah Akuntan Publiknya 50% (lima puluh per seratus) atau lebih berasal dari KAP yang telah menyelenggarakan audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas, diberlakukan sebagai kelanjutan KAP asal Akuntan Publik yang bersangkutan dan tetap diberlakukan pembatasan penyelenggaraan audit umum atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- f. Pendirian atau perubahan nama KAP yang komposisi Akuntan Publiknya 50% (lima puluh per seratus) atau lebih berasal dari KAP yang telah menyelenggarakan audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas, diberlakukan sebagai kelanjutan KAP asal Akuntan Publik yang ber-sangkutan dan tetap diberlakukan pembatasan penyelenggaraan audit umum atas laporan keuangan sebagai- mana dimaksud pada ayat (1).<sup>9</sup>

Pada bab ini, penulis mencantumkan tentang masa jabatan seorang akuntan atau audit perusahaan yang tergabung dalam *Jakarta Islamic Index* periode 2011 sampai dengan 2014 dalam bentuk tabel dibawah ini :

**Tabel 4.9**  
**Audit Tenure**

No	Kode	Audit Tenure			
		2011	2012	2013	2014
1	AALI	2	2	2	1
2	ADRO	3	2	1	1
3	AKRA	1	3	1	1
4	ASII	2	1	1	2
5	ASRI	3	3	2	2
6	BMTR	3	2	2	2
7	BSDE	2	2	2	2
8	CPIN	2	2	1	1
9	EXCL	2	3	2	2
10	HRUM	2	2	2	2
11	ICBP	2	3	4	5
12	INDF	2	3	4	5
13	INTP	2	3	4	5
14	ITMG	2	2	2	2
15	JSMR	2	1	2	2
16	KLBF	2	3	4	5
17	LPKR	2	1	1	1
18	LSIP	2	1	1	1
19	MAPI	2	0	0	2

<sup>9</sup> Bambang Hartadi, *Pengaruh Fee Audit, Rotasi KAP, Dan Reputasi Auditor Terhadap Kualitas Audit Di Bursa Efek Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Akreditasi No.110/DIKTI/Kep.2009, Volume 16, Nomor 1, Maret 2012, hlm. 92-93.

No	Kode	Audit Tenure			
		2011	2012	2013	2014
22	PGAS	3	2	1	1
23	PTBA	2	2	1	2
24	PWON	3	2	2	2
25	SMGR	0	2	2	2
26	SMRA	3	3	1	1
27	TLKM	2	2	1	3
28	UNTR	1	2	2	0
29	UNVR	2	2	2	2
30	WIKA	2	2	2	2

Sumber : Annual report perusahaan jakarta islamic index periode 2011-2014

Dari tabel 4.9, maka terlihat jelas bahwasanya audit *tenure* dari masing-masing perusahaan dan tahun periode 2011 sampai dengan tahun 2014 terlihat bahwa lamanya auditor memberikan jasa audit yang masanya 1 tahun ada 25 perusahaan, sedangkan yang 2 tahun ada 68 perusahaan. Untuk lamanya auditor memberikan jasa audit yang 3 tahun ada 15 perusahaan, yang 4 tahun hanya ada 4 perusahaan dan yang lamanya mengaudit selama 5 tahun ada 4 perusahaan saja. Padahal lamanya jasa audit itu mempengaruhi suatu integritas laporan keuangan. Karena semakin lama maka akan mempengaruhi integritas laporan keuangan dari suatu perusahaan.

#### 6. Deskripsi Variabel Spesifikasi Kantortan Audit

*The Big Four* adalah kelompok empat firma jasa profesional dan akuntansi internasional terbesar, yang menangani mayoritas pekerjaan audit untuk perusahaan publik maupun perusahaan tertutup. Kelompok ini sempat dikenal sebagai "Delapan Besar", dan berkurang menjadi "Lima Besar" melalui serangkaian kegiatan merger. Lima Besar menjadi Empat Besar setelah keruntuhan *Arthur Andersen* pada 2002, karena keterlibatannya dalam Skandal Enron. Sejak tahun 1898, merger dan satu skandal besar yang melibatkan *Arthur Andersen* telah

mengurangi jumlah firma akuntansi besar dari delapan menjadi empat. Yaitu Macam-macam Firma Empat Besar adalah sebagai berikut:

**a. *Deloitte Touche Tohmatsu***

*Deloitte Touche Tohmatsu* adalah salah satu Kantor Akuntan Publik yang memiliki total pendapatan secara global tertinggi (dicapai pada tahun 2013) diantara Anggota *Big Four* yang lainnya yakni dengan total pendapatan \$32.4 Billion. *Deloitte Touche Tohmatsu* berkantor pusat di Amerika Serikat. Pertumbuhan *Deloitte Touche Tohmatsu* secara global mengalami kenaikan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dan juga bersaing keat dengan *PricewaterhuseCoper* dalam segi pendapatan. *Deloitte Touche Tohmatsu* memiliki lebih dari 200.000 tenaga kerja profesional dan mempunyai cabang lebih dari 150 negara di dunia.

Di Indonesia, *Deloitte Touche Tohmatsu* bekerja sama dengan Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dan berlokasi di 2 tempat, yaitu Jakarta dan Surabaya. Berbagai jenis jasa yang ditawarkan oleh *Deloitte Touche Tohmatsu* Indonesia diantaranya:

**1) *Advisory & Assurance***

Jasa yang ditawarkan berupa jasa attestasi & kosultan, jasa audit merupakan salah satu jenis jasa yang ditawarkan *Deloitte* untuk assurance nya. Sedangkan untuk assurance-nya, *Deloitte* mengedepankan konsultasi mengenai adopsi laporan keuangan berbasis IFRS (International Financial Reporting Standart).

**2) *Consulting***

Jasa yang diberikan berupa masukan-masukan pendapat professional kepada klien-klien yang membutuhkan. Umumnya konsultasi berupa target pasar, lokasi pendirian pabrik, isu hukum di indonesia, dll. Klien-klien luar negri

umumnya membutuhkan tenaga konsultasi yang handal dan professional sebelum mendirikan perusahaan-nya disini.

### 3) *Enterprise Risk Service*

Berupa jasa yang berhubungan dengan pengendalian resiko & compliance di perusahaan, baik di sisi operasional, teknikal maupun secara finansial perusahaan. Jasa yang dimaksud diantaranya :

- a) *Control Assurance* : Membantu perusahaan membuat dan mengawasi SOP yang dibuat agar berjalan dengan baik di lingkungan perusahaan.
- b) *Internal Audit* : Melihat apakah SOP yang ditetapkan perusahaan sudah dijalankan dengan baik dan maksimal oleh masing-masing divisi.
- c) *Security Service* : Berhubungan dengan tingkat keamanan data perusahaan.
- d) *Risk Management* : Meminimalisasikan resiko yang mungkin terjadi di manajemen perusahaan, misalnya : Turn-over karyawan yang tinggi .danRegulatory Compliance yaitu menjaga agar perusahaan taat dengan regulasi yang di buat oleh pemerintah.

### 4) *Financial Advisory*

Berupa jasa pemberi nasihat yang berfokus pada hal-hal yang berhubungan dengan laporan keuangan. Jika Consulting mungkin lebih ditekankan kearah teknikal, tapi financial advisory lebih kearah laporan keuangan yang akan disajikan. Financial advisory di Deloitte dipecah sebagai berikut :

- a) *Corporate Finance* : Jasa konsultasi jika perusahaan ingin melakukan IPO, Akuisisi, Merger.
- b) *Forensic* : Fraud, Corrupt, Money Loundring adalah hal-hal yang akan divisi ini tangani.

- c) *M & A Transaction Service* : Bagaimana proses awal hingga akhir untuk perusahaan yang akan melakukan M&A (Merger & Acquisition).
- d) *Reorganisation* : Jasa advisory mengenai bagaimana cara perusahaan ingin merestrukturisasi ulang perusahaannya.
- e) *Valuation* : Berfokus pada penilaian tentang berapa biaya yang akan dikeluarkan jika sengketa masuk ke ranah hukum, bisa juga tentang penilaian prospek bisnis.

#### 5) *Tax*

Jasa yang diberikan ketika perusahaan menghadapi kesulitan dalam menangani masalah perpajakan. Perusahaan-perusahaan yang diaudit oleh Deloitte Touche Tohmatsu diantaranya PT Barito Pacific, PT Petrosea, PT Jakarta Setiabudi International dan Garuda Indonesia.

#### b. *PricewaterhouseCoopers*

*PricewaterhouseCoopers* dibentuk pada tahun 1998 dari penggabungan usaha antara *PriceWaterhouse* dan *Coopers & Lybrand*. Penghasilan gabungan *PricewaterhouseCoopers* di seluruh dunia mencapai 20.3 billion dolar Amerika Serikat untuk tahun fiskal 2005, dan mempekerjakan lebih dari 130.000 profesional di 148 negara. *PricewaterhouseCoopers* berkantor pusat di Britania Raya. Afiliasi *Price Waterhouse Cooper* di Indonesia adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana & Rekan.jasa yang disediakan oleh PWC Indonesia diantaranya adalah kepada klien Astra International Group, XL Axiata Tbk, United Tractor, dan Unilever<sup>10</sup>

#### c. *Ernst & Young*

Merupakan firma jasa profesional multinasional yang berpusat di London, Inggris, Britania Raya. EY merupakan firma

---

<sup>10</sup><http://kantor-akuntan-publik-dan-big-four/2012>, diakses pada tanggal 20 juli 2016 jam 12:45 WIB

jasa profesional terbesar ketiga di dunia menurut pendapatan pada tahun 2012. Berbagai jenis jasa yang ditawarkan oleh EY di Indonesia, diantaranya :

1) Advisory

Ada beragam jenis jasa yang ditawarkan oleh EY di divisi advisory, diantaranya IT Advisor, Advisor Financial Service dan Performance Improvement. Jasa advisor ini lebih berfokus ke arah jasa konsultasi terhadap klien, dimana klien meminta pendapat kepada mereka tentang hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan. Bisa bertanya di sisi legal perusahaan, peraturan pemerintah atau daerah.

2) *Assurance dan Accounting Compliance Report*

Berfokus pada ketaatan pelaporan keuangan dibidang akuntansi.misalnya cara melakukan cost accounting, plantation accounting (Untuk perusahaan sawit), Oil accounting.Dan beberapa perusahaan yang diaudit oleh EY di Indonesia :Bank Bukopin, Indofood Sukses Makmur, PT Kalbe Farma, Telkom Indonesia<sup>11</sup>

Untuk mempermudah mengetahui gambaran umum kantor akuntan publik pada semua perusahaan yang tergabung dalam *Jakarta Islamic Index* tahun 2011 sampai dengan 2014 yang kantor akuntan publiknya sesuai dalam bidangnya, maka penulis mencantumkan kantor akuntan publik melalui tabel dibawah ini :

---

<sup>11</sup><http://pppk.kemenkeu.go.id/News/Details/18>, diakses pada tanggal 25 juli 2016, pada jam 09:55 WIB.

**Tabel 4.10**  
**Kantor Akuntan Publik**

<b>No</b>	<b>Kode</b>	<b>Perusahaan Di Bidang</b>	<b>Spesifikasi Kantortan Audit 2011</b>	<b>Spesifikasi kantortan Audit 2012</b>	<b>Spesifikasi kantortan Audit 2013</b>	<b>Spesifikasi kantortan Audit 2014</b>
1	AALI	Minyak Kelapa Sawit	0	0	0	0
2	ADRO	Tambang dan Energi Indonesia	0	0	0	0
3	AKRA	Perdagangan dan distribusi BBM	1	1	1	1
4	ASII	Otomotif, jasa keuangan dan teknologi informasi	0	0	0	0
5	ASRI	Pengembangan properti	0	0	0	0
6	BMTR	Televisi	0	0	0	0
7	BSDE	Pengembangan kota	0	0	0	0
8	CPIN	Pakan ternak	1	1	1	1
9	EXCL	Telekomunikasi XL	1	1	1	0
10	HRUM	Pertambangan	0	0	0	0
11	ICBP	Total Food solutions Indofod	1	1	1	1
12	INDF	Indofod	1	1	1	1
13	INTP	Semen dan bahan bangunan	1	1	1	1
14	ITMG	Pertambangan	0	0	0	0
15	JSMR	Pembangunan infrastruktur jalan tol	0	0	0	0
16	KLBF	Obat-obatan dan layanan kesehatan	0	0	0	0
17	LPKR	Properti	0	0	0	0
18	LSIP	Perkebunan dan perdagangan	1	1	1	1
19	MAPI	Pemasaran ritel	1	0	0	0
20	MNCN	Telekomunikasi	0	0	0	0
21	MPPA	Departement store	0	0	0	0
22	PGAS	Gas Bumi	1	1	1	1
23	PTBA	Produksi dan penjualan batu bara	0	0	0	0
24	PWON	Properti	1	1	1	1
25	SMGR	Semen dan bahan bangunan	0	1	1	0
26	SMRA	Properti	1	1	1	1

No	Kode	Perusahaan Di Bidang	Spesifikasi Kantortan Audit 2011	Spesifikasi kantortan Audit 2012	Spesifikasi kantortan Audit 2013	Spesifikasi kantortan Audit 2014
27	TLKM	Telekomunikasi	0	1	1	1
28	UNTR	CSR (Pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan)	1	1	1	0
29	UNVR	Kebutuhan rumah tangga (sabun, sampho dll)	1	1	1	0
30	WIKA	Kebutuhan rumah tangga yang ramah lingkungan	0	0	0	0

Sumber : *Annual report perusahaan JII tahun 2011-2014*

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, diketahui bahwa dari 30 perusahaan yang tergabung dalam *Jakarta Islamic Index* bahwasanya spesifikasi kantortan audit dihitung berdasarkan variabel dummy, dimana diberi nilai 1 untuk perusahaan yang diaudit oleh firma jasa profesional yang mengaudit sesuai dengan bidangnya, dan begitu sebaliknya apabila perusahaan diaudit oleh firma profesional yang mengaudit tidak sesuai dengan bidangnya diberi nilai 0. Dari 30 perusahaan dan 4 tahun pengamatan diketahui ada 51 perusahaan yang di audit oleh jasa firma profesional yang sesuai dalam bidangnya. Dan ada 69 perusahaan yang diaudit oleh firma profesional yang tidak sesuai dengan bidangnya.

### C. Hasil Uji Asumsi Klasik

Bersinggungan dengan penggunaan alat uji statistik parametrik dalam membantu menganalisis data penelitian, yaitu regresi linier berganda maka perlu pengujian asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini merupakan syarat yang harus terpenuhi, antara lain: multicollinearity, autokorelasi, heterocedasticity, dan normalitas. Adapun hasil pengujian asumsi klasik dijelaskan dalam sub bab berikut ini:

### 1. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik tentu tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel tersebut tidak membentuk variabel ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi adalah dapat dilihat dari nilai  $R^2$ , matrik korelasi variabel-variabel bebas, dan nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF).<sup>12</sup>

Untuk mengetahui hasil uji multikolinieritas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji T test dan Multicollinearity**

Model		Coefficients <sup>a</sup>					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	.105	.663		.158	.876		
	Komisaris Independen	.124	.706	.036	.175	.862	.868	1.153
	Kepemilikan Manajerial	-.001	.002	-.105	-.516	.611	.891	1.123
	Kepemilikan Institusional	.003	.004	.171	.739	.467	.680	1.471
	Komite Audit	-.094	.253	-.083	-.371	.714	.726	1.378
	Audit Tenure	.255	.156	.335	1.633	.116	.868	1.153

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4.11 diatas menunjukkan bahwa model bebas dari *multicollinearity* menunjukkan dengan hasil nilai *tolerance* menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 10 (0.868, 0.891, 0.680, 0.726 dan 0.868). Disamping itu, hasil perhitungan *variance inflation factor* (VIF)

<sup>12</sup>Masrukin, *Buku Latihan SPSS Aplikasi Statistik Deskriptif Dan Inferensial*, Media Ilmu Press, Kudus, 2010, hlm. 123.

juga menunjukkan tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai *variance inflation factor* (VIF) lebih dari 10 (1.243, 1.277, dan 1.498) (Ghazali Imam, 2010). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model fit bebas dari gangguan *multicollinearity*

## 2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu atau time series karena “gangguan” pada seseorang individu atau kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada individu atau kelompok yang sama pada periode berikutnya. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi.

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi dan Durbin Watson**

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.349 <sup>a</sup>	.122	-.061	.36036	1.034

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4.12 di atas menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson 1.034, yang mana nilai tersebut berda  $4-1,653 \leq 1.588 \leq 4-1.283$  sehingga dapat ditafsirkan bahwasanya nilai DW atau Durbin-Watson yang sebesar 1,034 lebih besar dari batas atas (du) yaitu 1,566, maka dapat disimpulkan bahwasanya terdapat autokorelasi positif pada model regresi.

## 3. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi

normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas data dapat mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal, yakni distribusi data yang berbentuk lonceng (*bell shaped*). Distribusi data yang baik adalah data yang mempunyai pola seperti distribusi normal, yakni distribusi data tersebut tidak mempunyai juling ke kiri atau kekanan dan keruncingan kekiri atau kekanan.

Uji normalitas pada analisis regresi dan multivariate sebenarnya sangat kompleks, karena dilakukan pada seluruh variable secara bersama-sama. Namun, uji ini bisa dilakukan pada setiap variable, dengan logika bahwa jika secara individual masing-masing variabel memenuhi asumsi normalitas, maka secara bersama-sama (*multivariate*) variabel-variabel tersebut juga bisa dianggap memenuhi asumsi-asumsi normalitas. Dan untuk mengetahui hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.13**  
Statistics

	Komisaris Independen	Kepemilikan Manajerial	Kepemilikan Institusional	Komitme Audit	Audit Tenure	Spesifikasi Kantortan Audit	Integritas Laporan Keuangan
N Valid	30	30	30	30	30	30	30
Missing	0	0	0	0	0	0	0
Mean	.9500	35.3987	31.0830	.7250	.4250	.0000	.3000
Median	1.0000	39.6900	31.2350	.8150	.1250	.0000	.1250
Mode	1.00	.00	.00	.00 <sup>a</sup>	.00	.00	.00
Std. Deviation	.10171	29.54165	22.93985	.31028	.46028	.00000	.34988
Variance	.010	872.709	526.237	.096	.212	.000	.122
<b>Skewness</b>	<b>-1.580</b>	<b>.103</b>	<b>.546</b>	<b>-1.515</b>	<b>.262</b>		<b>.750</b>
Std. Error of Skewness	.427	.427	.427	.427	.427	.427	.427
<b>Kurtosis</b>	<b>.527</b>	<b>-1.466</b>	<b>-.005</b>	<b>1.260</b>	<b>-1.902</b>		<b>-.686</b>
Std. Error of Kurtosis	.833	.833	.833	.833	.833	.833	.833
Sum	28.50	1061.96	932.49	21.75	12.75	.00	9.00

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4.13 diatas, diketahui bahwa kejulungan atau *skewnes* merupakan statistik yang dipakai untuk menentukan apakah

distribusi kasus termasuk berkurve normal atau tidak. Model positif terjadi apabila ekor memanjang ke sebelah kanan dan menunjukkan bahwa kasus banyak terkuster di kiri mean dengan kasus ekstrim ke kanan. Sebaliknya, jika ekornya memanjang ke sebelah kiri disebut model negatif, dan menunjukkan bahwa kasus banyak terkuster di kanan mean dengan kasus ekstrem di kiri. Model simetris mempunyai kejulungan = 0. Dalam hal ini, model berdistribusi normal pada program SPSS, jika mempunyai kejulungan  $\pm 1$ . Terlihat pada tabel diatas dikemukakan angka Skewness Komisaris independen sebesar (-1,580), kepemilikan manajerial sebesar (0,103), kepemilikan institusional sebesar (0,546), komite audit sebesar (-1,515), audit tenure sebesar (0,262), spesifikasi kantortan audit kosong, dan integritas laporan keuangan sebesar (0,750). Dimana masing-masing  $\pm 1$ . Dengan demikian termasuk berdistribusi normal.

Sedangkan Sedangkan kurtosis merupakan suatu cara untuk mengetahui tinggi rendahnya atau runcingnya bentuk kurve. Distribusi normal akan mempunyai kurtosis = 0. Sedangkan dalam program SPSS distribusi dipandang normal bila mempunyai kurtosis  $\pm 3$ . Terlihat pada tabel diatas dikemukakan angka Komisaris independen sebesar (0,527), kepemilikan manajerial sebesar (-1,466), kepemilikan institusional sebesar (-0,005), komite audit sebesar (1,260), audit tenure sebesar (-1,902), spesifikasi kosong, dan integritas laporan keuangan sebesar (-0,686). Dengan demikian termasuk kurve berdistribusi normal.

#### 4. Uji Homoskedastisitas

Untuk mengetahui uji homoskedastisitas dapat melihat tabel dibawah ini :

**Tabel 4.14**  
**Hasil Uji Homoskedastisitas**  
**Test of Homogeneity of Variance<sup>b,c,d,e,f,g,h,i,j</sup>**

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Komisaris Independen	Based on Mean	.828	1	21	.373
	Based on Median	.188	1	21	.669
	Based on Median and with adjusted df	.188	1	20.594	.669
	Based on trimmed mean	.828	1	21	.373
Kepemilikan Manajerial	Based on Mean	. <sup>a</sup>			
Kepemilikan Institusional	Based on Mean	. <sup>a</sup>			
Komite Audit	Based on Mean	. <sup>a</sup>			
Audit Tenure	Based on Mean	.004	1	21	.951
	Based on Median	.179	1	21	.677
	Based on Median and with adjusted df	.179	1	16.678	.678
	Based on trimmed mean	.000	1	21	.987

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4.14 diatas, maka dapat diketahui bahwasanya pada garis komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, audit tenure, dan spesifikasi kantortan audit dari tabel output SPSS diatas, dan dengan dasar mean didapat angka Sigsebesar 0,373, 0, 0, 0, 0,951. Oleh karena angka Sig < 0,05, maka  $H_0$  ditolak, dan dapat disimpulkan bahwasanya tidak terjadi heterokedastisitas pada variabel komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, audit tenure, dan spesifikasi kantortan audit.

#### D. Hasil Pengujian Hipotesis

##### 1. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk menentukan proporsi atau persentase total variasi dalam variabel terikat yang diterangkan oleh variabel

bebas.<sup>13</sup> Untuk melihat uji koefisien determinasi pada penelitian ini dapat melihat tabel dibawah ini :

**Tabel 4.15**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.349 <sup>a</sup>	.122	-.061	.36036

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016

B

erdasarkan tabel 4.15 diatas, dapat diketahui bahwasanya besarnya pengaruh komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, audit tenure dan spesifikasi kantortan audit terhadap integritas laporan keuangan adalah 0,122. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

## 2. Hasil Uji Simultan atau Uji F

**Tabel 4.16**  
**Hasil Uji Simultan (F Test)**

ANOVA <sup>b</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.433	5	.087	.667	.652 <sup>a</sup>
	Residual	3.117	24	.130		
	Total	3.550	29			

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016

Berdasarkan hasil output SPSS diatas, maka dapat diketahui bahwasanya nilai F hitung  $0,667 < 4,279$  dengan tingkat signifikan diabaah 0,05 yaitu 0,652. Berdasarkan cara pengambilan keputusan uji simultan dalam analisis regresi dapat disimpulkan bahwa variabel komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikaan institusional, komite audit, audit tenure dan spesifikasi jika diuji secara bersama-sama atau serempak tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

<sup>13</sup> <http://dataolah.co.id/2012/08/regresi-berganda-uji-f-uji-t-dan.html?m=1>, Diakses pada tanggal 28 Juni 2016, Pada jam 9:56 WIB

### 3. Uji Partial atau Uji t

Sedangkan untuk melihat uji t atau uji parsial pada penelitian ini dapat dilihat tabel dibawah ini :

**Tabel 4.17**  
**Hasil Uji t**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.105	.663		.158	.876
Komisaris Independen	.124	.706	.036	.175	.862
Kepemilikan Manajerial	-.001	.002	-.105	-.516	.611
Kepemilikan Institusional	.003	.004	.171	.739	.467
Komite Audit	-.094	.253	-.083	-.371	.714
Audit Tenure	.255	.156	.335	1.633	.116

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4.17, maka dapat diketahui bahwa nilai t hitung dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

**a. Hasil Uji Pengaruh Komisaris independen terhadap integritas laporan keuangan.**

Berdasarkan tabel 4.17 diketahui nilai t sebesar  $0,175 < 1,713$  dengan tingkat signifikan dibawah 0,05 yaitu 0,862, sehingga variabel komisaris independen tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) yang menyatakan tidak ada pengaruh yang signifikan antara (X1) sebagai variabel independen terhadap integritas laporan keuangan (Y) **ditolak**.

**b. Hasil Uji Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap integritas laporan keuangan.**

Berdasarkan tabel 4.17 diketahui nilai t sebesar  $-0,516 < 1,713$  dengan tingkat signifikan dibawah 0,05 yaitu 0,611 sehingga kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Dengan demikian hipotesis kedua (H2) yang menyatakan tidak ada pengaruh yang signifikan antara (X2) sebagai variabel independen terhadap integritas laporan keuangan (Y) **ditolak**.

**c. Hasil Uji Pengaruh kepemilikan Institusional terhadap integritas laporan keuangan.**

Berdasarkan tabel 4.17 diketahui nilai t sebesar  $0,739 < 1,713$  dengan tingkat signifikan dibawah  $0,05$  yaitu  $0,467$ . sehingga kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Dengan demikian hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan tidak ada pengaruh yang signifikan antara (X3) sebagai variabel independen terhadap integritas laporan keuangan (Y) **ditolak**.

**d. Hasil Uji Pengaruh komite audit terhadap integritas laporan keuangan**

Berdasarkan tabel 4.17 diketahui untuk t hitung variabel X4 (komite audit) nilai t hitungnya sebesar  $-0,371 < 1,713$  dengan tingkat signifikan dibawah  $0,05$  yaitu  $0,714$ . sehingga komite audit tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Dengan demikian hipotesis keempat (H4) yang menyatakan tidak ada pengaruh yang signifikan antara (X4) sebagai variabel independen terhadap integritas laporan keuangan (Y) **ditolak**

**e. Hasil Uji Pengaruh audit tenure terhadap integritas laporan keuangan**

Berdasarkan tabel 4.17 diketahui nilai t sebesar  $1,633 < 1,713$  dengan tingkat signifikan dibawah  $0,05$  yaitu  $0,116$ . sehingga audit tenure tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Dengan demikian hipotesis kelima (H5) yang menyatakan tidak ada pengaruh yang signifikan antara (X5) sebagai variabel independen terhadap integritas laporan keuangan (Y) **ditolak**.

## **E. Pembahasan Hasil Hipotesis**

### **1. Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis Pertama**

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber data yang digunakan untuk menilai kinerja setiap perusahaan. Hasil kinerja keuangan sangat berperan penting dalam kelangsungan usaha atau pengembangan

usaha yang sedang berjalan. Diperlukan para pemegang saham atau pemilik perusahaan yang aktif dalam meninjau kinerja perusahaan, karena mereka menganggap bahwa pengelolaan perusahaan yang lebih baik akan memberikan imbalan hasil yang lebih tinggi. Penerapan pengelolaan perusahaan yang baik berfokus pada proses manajemen risiko dan pengendalian internal yang efektif akan meningkatkan kinerja serta daya saing dan kreativitas nilai perusahaan yang nantinya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk mengetahui pengaruh struktur corporate governance, audit tenure, dan spesifikasi kantortan audit terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan yang tergabung dalam *Jakarta Islamic Index* tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Maka harus memahami variabel-variabel dalam penelitian ini.

Penelitian ini, terdiri dari tujuh variabel dimana enam variabel independent dan satu variabel dependen dengan judul pengaruh struktur *corporate governance*, audit tenure, dan spesifikasi kantortan audit terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan yang tergabung dalam *Jakarta Islamic Index* tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Variabel tersebut adalah komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, audit tenure dan spesifikasi kantortan audit terhadap integritas laporan keuangan.

Komisaris independen yang diukur dengan variabel dummy, dimana untuk perusahaan yang memiliki komisaris independen diberi nilai 1 dan nilai 0 untuk perusahaan yang tidak mempunyai komisaris independen. Dari 30 perusahaan yang tergabung dalam *Jakarta Islamic Index*, diketahui bahwasanya hanya 4 dari perusahaan yang tidak memiliki komisaris independen. Ini karena penulis tidak melihat secara jelas di dalam annual report perusahaannya. Hasil dari uji asumsi klasik dan uji determinasi serta uji simultan dan partial diketahui bahwasanya komisaris independen secara serempak tidak mempengaruhi integritas laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena dalam perusahaan, keberadaan

komisaris independen hanya untuk memenuhi ketentuan formal saja. Pengangkatan komisaris independen oleh perusahaan hanya dilakukan untuk pemenuhan regulasi saja tapi tidak dimaksudkan untuk menegakkan *Good Corporate Governance* (GCG) di dalam perusahaan. Dengan demikian kualitas komisaris independen dalam perusahaan relatif rendah. Sehingga tidak memicu konflik antara pemegang saham dengan manajer. Hal ini dikarenakan pemegang saham mengira dengan adanya komisaris independen sudah tentu laporan keuangan akan berintegritas.

Pada dasarnya komisaris independen tidak ada pemisahan yang tegas antara kedudukan direksi (*executive board*) dan Komisaris (*supervisory board*). Sebagai negara yang menganut *two-tier board system*, seharusnya terdapat pemisahan yang tegas mengenai kedudukan Direksi (*executive board*) dan Komisaris (*supervisory board*) dalam perusahaan. Namun dalam praktiknya, seringkali pemisahan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga terkesan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia menganut *one-tier board system*, dimana Direksi dan Komisaris mengendalikan perusahaan dengan sangat kuat, dan menjadikan salah satunya hanya sebagai pelengkap penderita, pajangan artistik untuk memenuhi kriteria Undang-Undang, atau sebagai pembuka jalan bagi praktik praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Seperti yang di tulis Coase, ada hal yang menarik mengenai biaya keagenan. Pertama, lingkup pembahasan pada level perusahaan (organisasi) semakin mendapat perhatian. Kedua, pengelolaan distribusi barang dan jasa di dalam masyarakat dengan memakai mekanisme organisasi ada biayanya. Coase mengakui bahwa perusahaan tidak lain hanyalah kumpulan kontrak atau perikatan yang didalamnya berisi hak master (tuan) untuk memerintah pelayan (buruh atau servant) untuk kapan, dimana, dan berapa banyak bekerja.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh N.P. Yani Wulandari dan Ketut Budiarta yang mengemukakan bahwa

komisaris independen tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Berdasarkan uji hipotesis pertama didapatkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini terlihat dari tabel 4.17 bahwa nilai  $t$  hitung variabel  $X_1$  (Komisaris independen) sebesar  $0,175 < 1,713$  dengan tingkat signifikan dibawah  $0,05$  yaitu  $0,862$ , sehingga variabel komisaris independen tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Hal ini berdasarkan teori agensi yang mengungkapkan bahwa adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang dialami antara agen dan *principal* karena terdapat perbedaan tujuan diantara keduanya, dimana terdapat asumsi dasar yang melandasi teori agensi ini diantaranya, asumsi tentang sifat manusia yaitu sifat manusia yang suka mengejar dan mementingkan diri sendiri dengan akal bulus. Hal ini ditunjukkan bahwa agen akan melakukan tindakan yang tidak layak (*opportunistic*) yaitu untuk mendapatkan keuntungan pribadi (Jensen dan Meckling, 1976).

## 2. Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis Dua

Untuk variabel yang kedua yaitu kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial adalah proporsi pemegang saham oleh pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan, yaitu direksi dan komisaris (Pujiati dan Widanar, 2009). Dari sampel yang digunakan dalam penelitian ini mengatakan bahwasanya kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini berdasarkan uji hipotesis kedua, diketahui nilai  $t$  sebesar  $-0,516 < 1,713$  dengan tingkat signifikan dibawah  $0,05$  yaitu  $0,611$  sehingga kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya proporsi kepemilikan manajerial, tidak mempengaruhi integritas laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena pemilik manajerial tidak mau menanggung resiko yang tinggi dalam membuat keputusan yang menimbulkan adanya konflik dengan manajerial untuk mengurangi resiko pribadi. Pada saat

kekayaan pribadi diversifikasi manajer menuntut insentif tinggi untuk mengimbangi risiko yang diterima. Semakin tinggi resiko pihak manajerial maka akan mengurangi keterlibatannya dalam kepemilikan untuk mengurangi kemungkinan kehilangan kekayaan pribadi mereka. Dengan demikian kemungkinan kepemilikan manajerial relatif rendah. Sehingga tidak memicu konflik antara pemegang saham dengan manajemen. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Vivin Aulia Putri, Poni Harsanti, Aprilia Whetyningtyas yang mengemukakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Teori agensi yang mengungkapkan bahwa adanya konflik kepentingan yang dialami antara agen dan prinsipal, dimana terdapat asumsi dasar yang melandasi teori agensi ini diantaranya, asumsi tentang sifat manusia yaitu sifat manusia yang suka mengejar dan mementingkan diri sendiri dengan akal bulus. Hal ini ditunjukkan dengan pemilik manajerial tidak mau menanggung resiko yang tinggi dalam membuat keputusan yang menimbulkan adanya konflik dengan pemilik. Manajer mengurangi diversifikasi secara optimal untuk mengurangi resiko pribadi. Dengan demikian besar kecilnya proporsi kepemilikan manajerial, tidak mempengaruhi integritas laporan keuangan.

### **3. Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis Tiga**

Sedangkan variabel ke tiga adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun dan investment banking (Siregar dan Utama, 2005). Dari hasil uji asumsi klasik dan uji statistik mengatakan bahwasanya kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini terlihat dari tabel 4.17 bahwasanya nilai  $t$  sebesar  $0,739 < 1,713$  dengan tingkat signifikan dibawah 0,05 yaitu 0,467. Sehingga kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya proporsi kepemilikan institusional,

tidak mempengaruhi integritas laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena investor institusional dianggap memiliki kemampuan untuk memonitoring tindakan manajemen dibandingkan investor individual. Sehingga pihak manajer akan lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan dan menganalisa dengan baik dan tidak memanipulasi integritas laporan keuangan. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Vivin Aulia Putri, Poni Harsanti, Aprilia Whetyningtyas yang mengemukakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

#### **4. Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis Empat**

Untuk variabel keempat, yaitu komite audit juga tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwasanya komite audit yang dihitung dengan efektivitas kehadiran rapat dalam perusahaan tidak mempengaruhi integritas laporan keuangan. Keberadaan komite audit dalam perusahaan sangatlah penting. Karena tugasnya yaitu mengkaji kelayakan dan integritas manajemen risiko yang dihadapi oleh perusahaan yang tergabung dalam *Jakarta Islamic Index*, sistem pengendalian internal, dan sistem manajemen informasi, termasuk sistem untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, keputusan dan panduan yang berlaku. Serta mengusulkan struktur manajemen risiko dan pengendalian internal yang memadai kepada Manajemen untuk menjaga aset milik perusahaan jakart islamic index dan melaporkan risiko-risiko yang dihadapi perusahaan kepada Dewan Komisaris. Namun, ketidakpengaruhannya komite audit terhadap integritas laporan keuangan disebabkan oleh semakin sedikit efektivitas jumlah kehadiran rapat dalam perusahaan, maka akan mempengaruhi hasil keputusan rapatnya. Hal ini didukung dengan tabel 4.17, dimana nilai t hitungnya sebesar  $-0.371 < 1,713$  dengan tingkat signifikan dibawah 0,05 yaitu 0,714. sehingga komite audit tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Dan berdasarkan teori agensi, (Miller, 2005) berpendapat ada enam asumsi dalam teori keagenan, namun dalam kasus ini, asumsi yang mendasari teori agensi ini adalah tindakan agen yang akan mempengaruhi hasil yang didapatkan oleh prinsipal.

## 5. Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis Lima

Audit tenure adalah lamanya waktu auditor melakukan pekerjaan audit terhadap suatu perusahaan. Dalam audit tenure seringkali dikaitkan dengan independensi auditor. Kualitas audit dalam menilai laporan keuangan dipengaruhi oleh independensi auditor terhadap klien. Namun, dalam proses kegiatan audit diperlukan hubungan kerja yang erat antara auditor dengan pihak manajemen. Pembinaan hubungan kerja yang erat dapat diwujudkan dengan jangka waktu perikatan yang lama. Namun, hal tersebut dapat menyebabkan *shareholders* mempertanyakan independensi auditor dan menuntut kontrol yang lebih tinggi atas independensi. Masa perikatan yang lama antara auditor dengan kliennya berpotensi untuk menciptakan kedekatan antara mereka sehingga mengurangi independensi dan kualitas audit serta objektivitas dalam menilai laporan keuangan dimana auditor cenderung untuk menyesuaikan dengan berbagai keinginan pihak manajer dan pemegang saham. Peningkatan tenure KAP ini pula yang menyebabkan penurunan integritas laporan keuangan.

Audit tenure tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwasanya audit tenure yang dihitung dari lamanya memberikan jasa dalam mengaudit laporan perusahaan tidak mempengaruhi integritas laporan keuangan. Berdasarkan tabel 4.17 diketahui nilai  $t$  sebesar  $1,633 < 1,713$  dengan tingkat signifikan dibawah 0,05 yaitu 0,116. sehingga audit tenure tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Dimana berdasarkan teori agensi yang mengungkapkan bahwa adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang dialami antara agen dan *principal*, dimana terdapat asumsi dasar yang melandasi teori agensi ini diantaranya, sifat manusia yang mementingkan diri sendiri (Jensen dan

Meckling, 1976). Hal ini ditunjukkan dalam penelitian ini yang masa auditnya 5 tahun ada 4 perusahaan saja. maka hubungan antara auditor dan kliennya tidak akan menciptakan kedekatan antara kedua belah pihak. Sehingga tidak akan menambah independensian. Dan otomatis pihak auditor tidak akan menjalankan apa yang dikehendaki oleh kliennya. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktavia Nicolin dan Arifin Sabeni yang mengemukakan bahwa audit tenure tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

#### **6. Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis Enam**

Dan untuk variabel spesifikasi kantortan audit juga tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Pada variabel ini juga dihitung dengan variabel dummy, apabila perusahaan diaudit oleh firma profesional yang sesuai dalam bidangnya maka akan diberi nilai 1 dan begitupula sebaliknya, apabila perusahaan diaudit oleh firma profesional yang tidak sesuai dengan bidangnya maka diberi nilai 0. Terbukti dari sampel yang digunakan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwasanya dari jumlah keseluruhan sampel dikali empat yang menghasilkan sampel 30 perusahaan diketahui ada 51 perusahaan yang di audit oleh jasa firma profesional yang sesuai dalam bidangnya. Dan ada 69 perusahaan yang diaudit oleh firma profesional yang tidak sesuai dengan bidangnya. Misalnya dalam bidang telekomunikasi yang seharusnya mengaudit adalah Kantor akuntan publik Purwanto, Suherman dan Surja. Namun, dalam kenyataannya banyak perusahaan yang ditangani oleh firma profesional yang tidak sesuai dalam bidang yang semestinya diaudit. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan memiliki tingkat keintegritasan yang lebih rendah.

Pada dasarnya perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam *Jakarta Islamic Index* menggunakan eksternal audit. Dimana pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak luar yang bukan merupakan karyawan perusahaan. Jasa audit eksternal ini biasanya dilakukan oleh suatu spesialisasi profesi yaitu akuntan publik yang telah diakui oleh

Departemen Keuangan Republik Indonesia untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Hal ini juga berdasarkan teori agensi yang mengungkapkan bahwa adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang dialami antara agen dan *principal* karena terdapat perbedaan tujuan diantara keduanya, dimana terdapat asumsi dasar yang melandasi teori agensi ini diantaranya, asumsi tentang sifat manusia yaitu sifat manusia yang mementingkan diri sendiri dengan akal bulus. Hal ini ditunjukkan bahwa agen akan melakukan tindakan *oportunistic* yaitu untuk mendapatkan keuntungan pribadi (Jensen dan Meckling, 1976). Seperti tidak melakukan pengauditan dari kantortan audit yang sesuai dalam bidangnya dengan tujuan hasil laporan keuangan bisa dimanipulasi. Dengan demikian *principal* melakukan pemantauan dengan mengeluarkan informasi agar para agen tersebut melakukan tindakan yang sesuai kepentingan *principal*.

Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya untuk mengukur integritas laporan keuangan, maka laporan keuangan diukur dalam bentuk apa yang benar dan adil. Dalam hal tidak terdapat aturan, standar, panduan khusus atau dalam menghadapi pendapat yang bertentangan, anggota harus menguji keputusan atau perbuatannya dengan bertanya apakah anggota telah menjaga integritas dirinya. Integritas mengharuskan anggota untuk mentaati baik bentuk maupun jiwa standar teknis dan etika. Dan integritas juga mengharuskan anggota untuk mengikuti prinsip objektivitas dan kehati-hatian profesional.